



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.



Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; penyusunan LAKIP Tahun 2011 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LAKIP Kabupaten Sleman menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2011 yaitu tahun pertama RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2015.

I.2. KONDISI KABUPATEN SLEMAN

1. Letak Wilayah Geografis

Kabupaten Sleman secara geografis terletak diantara 110°12'57" dan 110°32'48" Bujur Timur, 7°32'28" dan 7°50'11" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa tengah; sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



2. Luas Wilayah

Kabupaten Sleman memiliki wilayah seluas adalah 57.482 Ha atau 574,82Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (3.185,80Km²), dengan jarak terjauh Utara - Selatan 32 Km, Timur-Barat 35Km. Secara administratif terdiri dari 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Padukuhan.

3. Topografi

Keadaan tanah wilayah Kabupaten Sleman dibagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan dibagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Makin ke utara kondisinya relatif miring dan dibagian utara sekitar lereng Merapi relatif terjal serta terdapat sekitar ± 100 sumber mata air, yang airnya mengalir ke sungai – sungai utama yaitu sungai Boyong, Kuning, Gendol dan Krasak. Disamping itu terdapat anak-anak sungai yang mengalir ke arah selatan dan bermuara di Samudera Indonesia.

Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara <100 s/d >1000 m dari permukaan laut. Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi empat kelas yaitu ketinggian < 100 m; 100 – 499 m; 500 – 999 m; dan > 1000 m dari permukaan laut. Wilayah dengan ketinggian < 100 m dari permukaan laut seluas 6.203Ha atau 10,79% dari luas wilayah terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Prambanan, Gamping dan Berbah.

Wilayah dengan ketinggian 100 – 499 m dari permukaan laut seluas 43.246Ha atau 75,32% dari luas wilayah, terdapat di 17 Kecamatan.

Wilayah dengan ketinggian 500 – 999 m dari permukaan laut meliputi luas 6.538ha atau 11,38% dari luas wilayah, meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan. Wilayah dengan ketinggian > 1000 m dari permukaan laut seluas 1.495Ha atau 2,60% dari luas wilayah meliputi Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan.

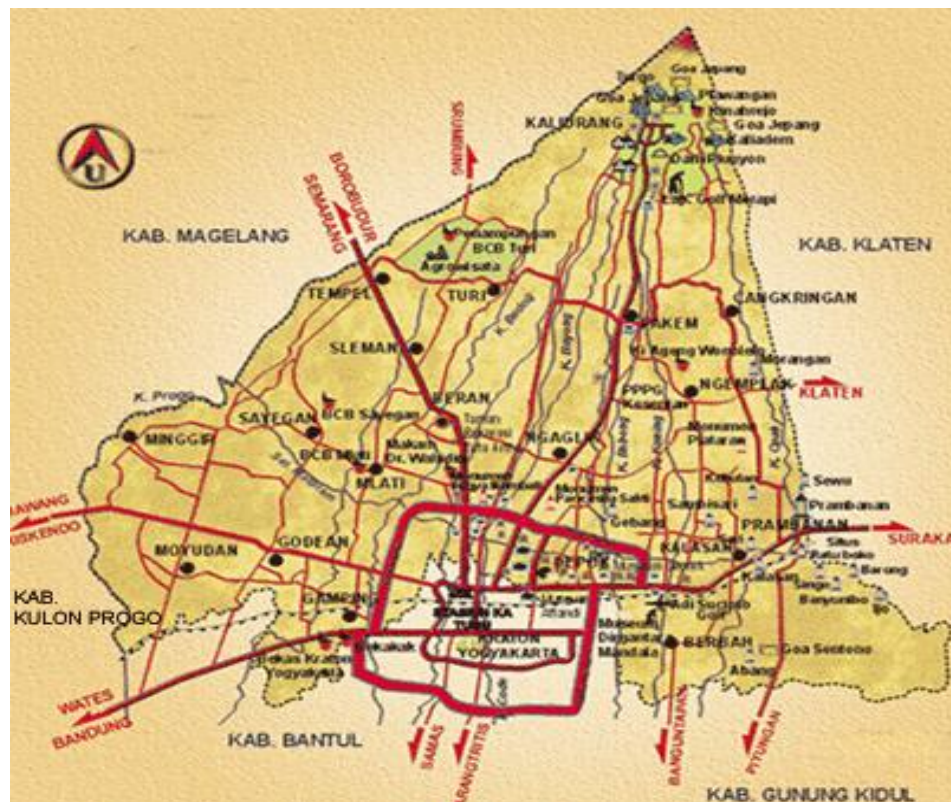
4. Karakteristik Wilayah

- a. Berdasarkan karakteristik sumber daya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 kawasan, yaitu:
- 1) Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan (*ringbelt*) sampai dengan puncak Gunung Merapi. Wilayah ini kaya sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan Gunung Merapi dan ekosistemnya. Keberadaan Gunung Merapi merupakan asset wisata maupun sumber daya alam galian C, namun diperlukan antisipasi yang memadai untuk mengeliminir dampak lain negatif jika terjadi erupsi.
 - 2) Kawasan timur, meliputi Kecamatan Prambanan, Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Di wilayah ini terdapat banyak peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya. Kondisi lahan kering, memiliki cadangan bahan batu putih yang cukup banyak.
 - 3) Kawasan tengah, yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.
 - 4) Kawasan barat, meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah dengan irigasi yang baik dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu dan gerabah.
- b. Berdasar jalur lintas antar daerah, wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan utama (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, Sleman, Tempel dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer, sehingga kecamatan-kecamatan tersebut menjadi wilayah yang cepat berkembang dan mengalami perubahan dari daerah pertanian menjadi wilayah industri, perdagangan dan jasa.

c. Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :

- 1) Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu) yang meliputi Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati sebagai wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.
- 2) Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antara desa dan kota) meliputi kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik yang terletak cukup jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan.
- 3) Wilayah fungsi khusus/wilayah penyangga (*buffer zone*) meliputi Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

Peta Wilayah Kabupaten Sleman



Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Sleman



5. Aparat Pemerintah

Keadaan Aparat Pemerintah dilingkungan Kabupaten untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2011 sejumlah 13.100 orang yang terdiri dari :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut:

- a. Golongan I : 221 orang, Golongan II : 2.830 orang, Golongan III : 4.364 orang, Golongan IV : 5.685 orang.
- b. Jabatan Struktural yang terdiri dari, Esselon II : 26 orang, Esselon III: 136 orang, Esselon IV: 552 orang, Esselon V: 66 orang.
- c. Jabatan Fungsional yang terdiri dari:
 - 1) Jabatan fungsional umum sejumlah 3.203 orang
 - 2) Jabatan fungsional Khusus Apoteker 10 orang, Asisten Apoteker 60 orang, Auditor 30 orang, Bidan, 193 orang, Dokter Umum 91 orang, Dokter Gigi 43 orang, Dokter Spesialis 22 orang, Epidemiologi Kesehatan 12 orang, Fisioterapi 3 orang, Guru 7.034 orang, Instruktur Latihan Kerja 32 orang, Kepala Sekolah 581 orang, Nutrisionis 53 orang, Pamong Belajar 10 orang, Pengawas ketenagakerjaan 4 orang, Pengawas Mutu Hasil Pertanian 17 Orang, Pegawai Sekolah 80 orang, Penguji Kendaraan Bermotor 11 orang, Penilik 9 orang, Penyuluh Kehutanan 13 orang, Penyuluh Keluarga Berencana 64 orang, Penyuluh Kesehatan Masyarakat 10 orang, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan 7 orang, Penyuluh Pertanian 82 orang, Mediator Hubungan Industrial 4 orang, Perawat 345 orang, Perawat Gigi 64 orang, Perekam Medis 56 orang, Pranata Laboratorium Kesehatan 61 orang, Pustakawan 9 orang, Radiografer 11 orang, Sanitarian 42 orang, dan Teknis Elektromedis 7 orang.
- d. Tingkat Pendidikan :SD 137 orang , SMP 304 orang, SLTA 3.318 orang, D1 210 orang, D2 2.386 orang, D3 996 orang, Sarjana Muda 300 orang, D4 44 orang, S1 5.019 orang, S2 386 orang.



Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan berbagai program melalui memberikan penghargaan, pendidikan pelatihan teknis umum dan fungsional, serta pemberian hukuman dan pembinaan.

a. Pemberian penghargaan

- Satya Lencana dengan masa kerja 20 tahun dan 30 tahun sejumlah 293 orang
- Pemberian Penghargaan Kenaikan Pangkat sejumlah 1.848 orang.
- Pemberian penghargaan Purna Tugas 221 orang

b. Pendidikan Pelatihan yang meliputi :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 347 orang
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 139 orang.
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan barang dan jasa sebanyak 100 orang
- 4) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebanyak 80 orang.
- 5) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan Fungsional melalui pengiriman pada lembaga pendidikan dan pelatihan sebanyak 254 orang

c. Pemberian Hukuman

Pelanggaran Disiplin Pegawai sebanyak 17 orang yang terdiri dari Pelanggaran disiplin pegawai tingkat ringan 8 orang, tingkat sedang 2 orang dan pelanggaran disiplin tingkat berat 7 orang.

d. Pada Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Sleman tidak melaksanakan pengadaan CPNS tetapi hanya pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dari formasi 2010 sejumlah 194 orang yang terdiri dari CPNS Tenaga Teknis 42 orang, Tenaga Kesehatan 61 orang dan Tenaga Guru 91 orang. Dari 194 formasi yang melakukan pemberkasan sebanyak 124 yang terdiri dari Tenaga Kesehatan 40 formasi dan Tenaga Guru 84 formasi.

6. Perekonomian.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata 10,05 % per tahun yaitu dari Rp 9,97 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp14,98 triliun pada tahun 2011. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (ADHK 2000) mengalami kenaikan rata-rata 4,07% per tahun yaitu dari Rp5,55 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp6,68 triliun di tahun 2011.

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman Tahun 2007-2011 (Jutaan Rupiah)

No	PDRB	2007	2008	2009	2010*	2011**
1.	ADHB	9.972.193	11.446.071	12.503.760	13.611.725	14.975.573
2.	ADHK	5.553.580	5.836.246	6.089.557	6.373.200	6.681.917

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman.

Keterangan: *) = angka sementara

**) = angka sangat sementara

b. Struktur Perekonomian Daerah

Struktur perekonomian daerah pada tahun 2011 sektor primer sebesar 13,05%, mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 16,48%, sektor sekunder sebesar 28,80%, mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 27,32%, dan sektor tersier 58,15% mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 56,2%

Empat sektor pendukung utama perekonomian di Kabupaten Sleman adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa-jasa; sektor industri pengolahan; dan sektor pertanian.

c. PDRB Perkapita

PDRB perkapita menurut harga berlaku (ADHB) selama 5 tahun meningkat rata-rata per tahun 10,03%. Pada tahun 2007 pendapatan perkapita sebesar Rp9.971.193,00 pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp14.975.573,00. Demikian juga PDRB perkapita menurut harga konstan (ADHK 2000) meningkat rata-rata per tahun 4,06% yaitu dari Rp5.553.680,00 pada tahun 2007 menjadi Rp6.681.915,00 pada tahun 2011.



d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman selama 5 tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 sebesar 4,61% sedangkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sebesar 4,11% dan pada tahun 2011 menjadi 4,84%.

e. Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Sleman pada tahun 2010 sebesar 7,46% menurun pada tahun 2011 menjadi 2,73%.

Pada tahun 2011 inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran sandang sebesar 6,39%, dan terendah pada kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,92%. Pada tahun 2010 inflasi tertinggi pada kelompok bahan makanan sebesar 22,02% dan inflasi terendah pada kelompok kesehatan sebesar 0,60%.

7. Bidang Keuangan Daerah dan Investasi

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan yang signifikan terhadap manajemen pemerintahan di daerah, yaitu desentralisasi dipandang sebagai suatu usaha untuk melakukan reformasi dan revitalisasi baik ditingkat regional maupun ditingkat nasional. Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya pengalihan tanggung jawab terhadap keuangan, administratif, pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga pertanggungjawaban atas pengelolaan potensi-potensi sumberdaya di daerah menjadi suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang kepala daerah. Adanya penekanan terhadap aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas) lebih ditegaskan dengan dikeluarkannya paket perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Salah satu azas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah aspek keterbukaan. Hal ini menuntut Pemda untuk dapat memberikan akses informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah seluas-luasnya kepada publik seperti menerbitkan laporan keuangan di media massa. Laporan

keuangan yang memadai juga sangat dibutuhkan oleh para investor, baik investor asing maupun domestik. Laporan keuangan tersebut dapat menjadi sarana komunikasi yang lebih handal bagi Pemda dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan bahwa realisasi anggaran pendapatan daerah tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun anggaran 2010 sebesar Rp1.095.629.962.415,93 menjadi Rp1.311.436.526.988,47 realisasi belanja tahun 2011 sebesar Rp1.278.166.681.380,30 sehingga terjadi surplus sebesar Rp33.269.845.608,17.

Sementara itu realisasi pembiayaan dari sisi penerimaan daerah sebesar Rp111.413.870.267,05 dan pengeluaran daerah sebesar Rp6.137.744.928,40.

Dari realisasi pendapatan sebesar Rp1.311.436.526.988,47 didukung oleh PAD sebesar Rp226.686.250.221,47 realisasi PAD ini melampaui target dari yang direncanakan sebesar Rp203.416.683.768,00 atau tercapai 111,44%.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011 terdapat pada Lampiran 2.

8. Sosial Budaya.

a. Penduduk.

Jumlah penduduk pada tahun 2011 tercatat 1.125.369 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 559.302 jiwa (49,70%) dan perempuan 566.067 jiwa (50,30%) dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,73% dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 306.701.

Penduduk Kabupaten Sleman sebagian besar berada pada rentang usia produktif 15-60 tahun. Struktur penduduk Kabupaten Sleman terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Struktur Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2011

No	Struktur Usia (tahun)	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Total
1.	0 – 4	32.088	30.285	62.373
2.	5 – 9	38.799	36.371	75.170
3.	10 – 14	40.252	37.453	77.705
4.	15 – 19	37.461	35.289	72.750
5.	20 – 24	37.095	36.334	73.429
6.	25 – 29	49.703	50.034	99.737
7.	30 – 34	55.938	54.872	110.810
8.	35 – 39	51.435	51.699	103.134
9.	40 – 44	48.386	48.432	96.818
10.	45 – 49	39.475	40.390	79.865
11.	50 – 54	32.822	34.389	67.211
12.	55 – 59	26.945	26.944	53.889
13.	60 – 64	17.862	19.636	37.498
14.	65 – 69	16.253	18.349	34.602
15.	70 – 74	13.219	16.037	29.256
16.	75 ke atas	21.569	29.553	51.122
	Total	559.302	566.067	1.125.369

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2011

b. Tenaga Kerja

Pada tahun 2011 sumber mata pencaharian penduduk Kabupaten Sleman terbesar bergerak di sektor pertanian yakni sebanyak 28,6% dan sektor jasa sebanyak 24,39%. Pada tahun 2010 dan tahun 2011 terdapat kecenderungan perubahan dominasi mata pencaharian penduduk yang cenderung mengarah pada sektor jasa, tidak lagi pada sektor perdagangan sebagaimana tahun 2009. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dinamika ekonomi penduduk Kabupaten Sleman semakin menguat ke arah sektor tersier. Secara rinci struktur mata pencaharian penduduk Kabupaten Sleman tergambar dalam tabel 1.3

**Tabel 1.3 Proporsi Penduduk Kab. Sleman yang Bekerja Per Lapangan Usaha (%)
Tahun 2011**

No	Sektor	Tahun		
		2009(%)	2010(%)	2011 (%)
1	Pertanian	20,31	24,39	28,26
2	Pertambangan & Penggalian	0,67	3,33	2,47
3	Industri	12,83	8,05	11,24
4	Listrik, Gas & Air	0,30	2,20	2,06
5	Bangunan	7,77	8,01	11,47
6	Perdagangan	26,36	12,10	10,53
7	Angkutan dan Komunikasi	3,42	4,00	4,23
8	Keuangan	3,43	3,35	4,8
9	Jasa-jasa	24,90	34,57	24,95
	Jumlah	100,00	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 92,38% dari angkatan kerja yang ada.

Tabel 1.4 Jumlah Angkatan Kerja

No	Uraian	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1	Bekerja	422.490	415.295	484.405
2	Tidak Bekerja	45.534	58.295	39.921
3	Jumlah	468.024	473.590	524.326
	Persentase tidak bekerja	9,73	12,31	7,61

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Erupsi Gunung Merapi tahun 2010 yang cukup besar ikut mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya penduduk yang tidak bekerja yang mencapai 14,03%, yang pada tahun 2009 jumlahnya sebesar 10,77%.

c. Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat antara lain dapat dilihat dari indikator rata-rata usia harapan hidup penduduk, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan, dan status gizi masyarakat.

Pada tahun 2011, rata-rata usia harapan hidup sebesar 75,76 tahun , lebih tinggi jika dibanding usia harapan hidup tingkat Provinsi DIY yaitu 74 tahun ataupun nasional sebesar 70,60 tahun. Usia harapan hidup

perempuan lebih tinggi daripada laki-laki yakni 76,30 tahun sedangkan laki-laki 73,04 tahun.

Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dipertahankan di bawah 10 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 sebesar 5,25 per 1000 kelahiran hidup. Kematian ibu (AKI) pada tahun 2011 sebesar 122 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk status gizi buruk balita pada tahun 2011 sebesar 0,50%.

d. Indek Pembangunan Manuasia (IPM)

Pembangunan daerah di kabupaten Sleman selalu diorientasikan untuk pembangunan manusia, yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar semua masyarakat Sleman memiliki kesejahteraan yang lebih baik dan memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan.

Upaya tersebut dijabarkan melalui pelayanan dan fasilitasi akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan. Hasil upaya tersebut dapat tergambarkan didalam perolehan Indeks Pembangunan Manusia sbb:

Tabel : 1.5 Indikator IPM Kabupaten Sleman, 2009-2010

No	Uraian	2009	2010
Komponen IPM			
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,74	75,06
2.	Angka Melek Huruf (%)	92,19	92,61
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,18	10,30
4.	Konsumsi riil per kapita (Rp000)	646,08	647,84
Indikator IPM			
1.	Kesehatan	82,90	83,43
2.	Pendidikan	84,08	84,63
3.	Pendapatan	66,12	66,52
IPM		77,70	78,20
	Reduksi Shortfall	2,05	2,21

Sumber: BPS Kabupaten Sleman (Angka Sementara)

Nilai IPM Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun terus meningkat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa telah terjadi perbaikan kualitas sumber daya manusia. IPM Kabupaten Sleman menduduki peringkat 13 dari 497 kabupaten/kota di Indonesia.

Target IPM Kabupaten Sleman di akhir tahun penyelenggaraan RPJM pada tahun 2015 adalah sebesar 80 point.

e. Indek Pembangunan Gender (IPG)

Indek Pembangunan Gender dipakai untuk mengukur angka rata-rata pencapaian kemampuan dasar dengan penyesuaian untuk memperhitungkan ketimpangan gender. Titik berat pembangunan gender adalah pemberdayaan manusia tanpa membedakan gender sehingga mereka memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan.

Tabel : 1.6 Indikator IPG Kabupaten Sleman Tahun 2009-2010

No	Uraian	2009	2010
Komponen IPG			
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,74	75,56
2.	Angka Melek Huruf (%)	92,19	89,40
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,18	9,66
4.	Kontribusi Perempuan terhadap Pendapatan (%)		0,36
Indikator IPG			
1.	Kesehatan	82,90	85,93
2.	Pendidikan	84,08	81,07
3.	Pendapatan	66,12	55,51
IPG		73,94	74,17

Sumber: BPS Kabupaten Sleman

Pada tahun 2010 untuk wilayah provinsi DIY nilai IPG kabupaten Sleman berada di peringkat 2 dan peringkat 10 untuk tingkat nasional.

Selisih antara nilai IPM dengan IPG menunjukkan jarak ketimpangan gender, pada tahun 2009 ketimpangan gender sebesar 3,76 meningkat pada tahun 2010 menjadi 4,03.

Tabel:1.7 Ketimpangan Gender di Kabupaten Sleman Tahun 2009 dan 2010

NO	Tahun	Nilai IPM	Nilai IPG	Ketimpangan Gender
1.	2009	77,70	73,94	3,76
2.	2010	78,20	74,17	4,03

Sumber: BPS Kabupaten Sleman



I.3. KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. Kedudukan

Dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kabupaten Sleman dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu:

a. Aspek Politik

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Sleman dari aspek politik ditandai dengan keberadaan dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu di tingkat desa dapat dilihat dengan telah terbentuk dan berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di semua desa (86 desa). Demikian pula peran serta anggota BPD merupakan bukti pelaksanaan otonomi daerah dari aspek politik dapat berlangsung dengan baik.

b. Aspek Administrasi/ Manajemen Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik.

2. Kewenangan dan Tugas Pokok

a. Kewenangan

Dengan dijadikannya Kabupaten Sleman sebagai daerah otonomi, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang– Undang No.32 Tahun 2004 kewenangannya mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan,



peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional. Kewenangan wajib sebagaimana disebut diatas meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja serta lain-lain urusan seperti urusan pengembangan otonomi daerah, sosial, politik dalam negeri, olah raga, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, penerangan, pertambangan dan energi, kelautan dan pariwisata.

b. Tugas Pokok

Pemerintah Kabupaten Sleman mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kabupaten Sleman yang madani, sejahtera lahir dan batin berlandaskan iman dan taqwa.

3. Struktur Organisasi

Organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.

Dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi perangkat daerah yang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Pendidikan dan Olah Raga;
5. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;



7. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
9. Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral;
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
11. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
12. Dinas Pasar;
13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
14. Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah;
15. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Badan Kepegawaian Daerah;
18. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
20. Inspektorat Kabupaten;
21. Rumah Sakit Umum Daerah Sleman;
22. Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan;
23. Kantor Perpustakaan Daerah;
24. Kantor Arsip Daerah;
25. Kantor Lingkungan Hidup;
26. Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal;
27. Kantor Pelayanan Perizinan;
28. Satuan Pamong Praja;
29. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
30. Kecamatan.